BAB II

KAJIAN TEORETIK

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian ang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan di teliti.[1]

A. Perilaku Pemilih

Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan[2]. Pemilih dalam hal ini dapat berupa kontestan yang merasa diwakili oleh suatu ideology tertentu yang kemudian termanifestasi dalam intitusi seperti parti partai politik.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun, atau sudah pernah kawin. Tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berhak memberikan hak pilihnya adalahpemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi karena alas an tertentu pemilih tidak bias menggunakan hak pilihnya ditempat pemungutan suara (TPS) tempat dian terdaftar.

Dalam peraturan (KPU) No. 35 tahun 2008 tentang pemungutan dan perhitungan suara, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut harus mendaftar diri ke TPS yangbaru paling lambat tiga hari sebelum pemunguitan suara. Jadi secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk

[1] Mordalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hal. 41
[2] Joko J. Prihatmoko,Pilkada Secara Langsung, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya pada kontestan yang bersangkutan.

B. Pendekatan Perilaku Pemilih

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain., dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam kontekd politik, perilaku dilategorikan sebagai interpretasi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan, dan diantara kelompok individual dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Di tengah masyarakat individuberperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik. Sebagaian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa,menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik[3].

Aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum. Bila voters menentukan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih mendukung kandidat tertentu[4].

[3] Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), Hal. 15
[4] Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Affan Gaffan, utnuk menganalisia perilaku pemilih, maka terdapat duan pendekatan yaitu pendekatan sossiologis (dikenal dengan mahzab Columbia) dan pendekatan psikologis (dikenal dengan mahzab Michigan). Pendekatan sosiologis menyatakan bahwa preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kota, pemilihan merupakan produk dari karakteristik social ekonomi seperti profesi, kelas social, agama, dan lain-lain.

Dengan kata lain latar belakang seorang atau kelompok orang seperti jenis kelamin, kelas social, ras, etnik, agama, ideology, da nasal daerah merupakan variable independen yang mempengaruhi keputusan memilih, selanjutnya untuk pendekatan psikologis, mengungkapkan bahwa keputusan memilih terhadap partai politik atau kandidat performa pemerintah yang saat itu berkuasa, isu-isu yang dikembangkan oleh kandidat, dan loyalitas terhadap partai[5].

Menurut Adman Nursal ada beberapa pendekatan yang bias digunakan untuk melihat perilaku memilih diantaranya :

a. Pendekatan Sosiologis

   Mahzab colombiapendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik social dan pengelompokkan social, usia,jenis kelamin, pekerhaan agama, latar belkang keluarga, kegiatan dalam kelompok formal dan informal lainnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih.

b. Pendekatan Psikologis

[5] Affan Gaffan, Javanese voters…….Hal 4-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahzab Michigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini didasari oleh konsep sikap an sosialisasi.

c. Pendekatan Rasional

Pemilih yang dapat melakukan penilaian secara valid atas tawaran yang dilakukan oleh kandidat. Selain itu, pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan dalam pengambilan keputusan memilih bukan pada factor kebiasaan atau kebetulan, bukan pula menurut pertimbangan dan pemikiran logis.

d. Pendekatan Marketing

Newman dan Sheth mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing,. Menurut model ini, perilaku memilih ditentukan oleh tujuan domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut.

1) Isu dan Kebijakan Publik

Komponen isu dan kebijakan Publik mempresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat partai politik jika kelak menang.

2) Citra Sosial

Citra social adalah citra kandidat dlam pemikiran pemilih mengenai “m kelompok social mana atau tergolong sebagai apa seorang kandidat politik.

3) Perasaan Emosional

Dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditujukan oleh politik yang ditawarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Citra Kandidat

Mengacu pada sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.

5) Peristiwa Mutakhir

Mengacu pada himpunan peristiwa, isu dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.

6) Perristiwa Personal

Mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi yang dialami oleh kandidat.

C. Tipologi Pemilih

Dalam memilih sebuah partai politik maupun kontestan, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil dalam menentukan pilihannya. Pereilaku ini berasal dari persepsi pemilih dalam melihat profil maupun *trade record* dari partai politik maupun kandidat atau caleg. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dalam nentukan keputusannya.

Firmanzah membagi kesamaan yang akan dalam menilai kedekatan dengan partai politik atau kontestan yaitu, pertama, kesamaan akan hasil akhir ingin di capai (poli)cy-problem sloving). Dan kedua, kesamaan akan faham dan nilai dasaar igeologi (ideology dengan salah satu partai atau seorang kandidat[6].

Atas dasar model kesamaan dan kedekatan ideology dan policy problem sloving, menurut Firmanza terdapat empat tipologi[7]. Sebagai berikut :

1. Pemilih Rasional

[6] Firmanza, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hal 115

[7] www.academia.edu/1236615/Perilaku_Pemilih_Perempuan_dalam_Pendidikan_Umum_Presiden_dan_Wakil_Presiden_di_Kota_Malang_Tahun_2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilih rasional ini memiliki kemampuan orientasi yang cukup tinggi terhadap policy-problem-sloving dan berorientasi rendah untuk factor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan partai politik atau calon peserta pemilu dengan programkerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai masalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideology kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

2. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagi pijakan untuk menetukan partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru mencoba kemudian memahami nilai-nilai dan faham yang melatar belakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem ideology partai dengan kebijakan yang di buat.[8]

3. Pemili Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan dengan sesuatu yang penting dalam

[8]Ardial, *Komunikasi Politik*, ….. Hal.144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu, Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidian dan lainnya dianggap prioritas kedua. Pemilih jenis ini mudah dimobilisasi selama massa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

4. Pemilih Skeptis

   Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideology yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatau hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya melakukan secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenangdalam pemilu hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terjadi bagi kondisi daerah atau Negara ini.[9]

[9] Randi R & Riant Nugroho, Menejemen Pemberdayaan, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2007), Hal. 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id